**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA**

**2.1 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah menyebutkan bahwa laporan keuangan merupakan laporan terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi – transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.

Tujuan laporan keuangan terdiri atas tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum dari laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Sedangkan tujuan khusus laporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan bagi pihak yang berkepentingan (Bastian,2010:9).

**2.2 Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Komponen-komponen laporan keuangan dalam standar akuntansi pemerintahan (PP No. 71 tahun 2010) berbasis akrual adalah sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyajikan informasi mengenai anggaran dan realissi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan. LRA menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif. Selain itu, LRA juga dapat menyediakan informasi kepada para pengguna laporan keuangan pemerintah tentang indikasi perolehan dan pengggunaan sumber daya ekonomi dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan, sehingga dapat menilai apakah suatu kegiatan/program telah dilaksanakan secara efisien, efektif, dan hemat, sesuai dengan anggarannya (APBN/APBD), dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

1. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL) menyajikan pos-pos berikut, yaitu: saldo anggaran lebih awal (saldo tahun sebelumnya), penggunaan saldo anggaran lebih, sisa lebih/kurang pembiayaan (SILPA/SIKPA) tahun berjalan, koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, lain-lain dan saldo anggaran lebih akhir untuk periode berjalan. Pos-pos tersebut disajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya. LP-SAL dimaksudkan untuk memberikan ringkasan atas pemanfaatan saldo anggaarn dan pembiayaan pemerintah, sehingga suatu entitas pelaporan harus menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam LP-SAL pada CaLK.

1. Laporan Operasional

Laporan Operasional (LO) menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. LO disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual *(full accrual accounting cycle)* sehingga penyusunan LO, LPE,dan neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan.

1. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos ekuitas awal atau ekuitas tahun sebelumnya, surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan dan koreksi - koreksi yang langsung menmbah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar.

1. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

1. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas adalah bagian dari laporan finansial yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris. Klasifikasi tersebut memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna laporan untuk menilai pengaruh dari aktivitas tersebut terhadap posisi kas dan setara kas pemerintah. Informasi tersebut juga dapat digunakan untuk mengevaluasi hubungan antar aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

1. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) meliputi penjelasan atau daftar terperinci nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, Nerca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas.

**2.3 Karakteristik Kualitatif atas Informasi dalam Laporan Keuangan**

Informasi akuntansi dalam LKPD harus mempunyai karakteristik kualitatif tertentu. Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Menurut Bastian (2006: 99-101), karakteristik kualitatif merupakan ciri khas informasi dalam laporan keuangan yang berguna bagi pemakai. Terdapat empat karakteristik pokok, yaitu:

* 1. Dapat dipahami

Karakteristik utama kualitas informasi yang ditampung dalam laporan keuangan sektor publik adalah kemudahannya untuk dipahami pemakai.

* 1. Relevan

Informasi memiliki kualitas yang relevan apabila informasi tersebut mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dalam menilai peristiwa masa lalu dan masa kini, atau memperkirakan masa depan.

* 1. Keandalan

Informasi memiliki kualitas yang andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material dan dapat diandalkan pemakainya.

* 1. Dapat diperbandingkan

Dapat diidentifikasi perbedaan kebijakan akuntansi yang diberlakukan untuk transaksi serta peristiwa lain yang sama dalam sebuah entitas dari suatu periode ke periode lain pada entitas yang berbeda.

**2.4 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mengungkapkan bahwa kinerja adalah keluaran/ hasil dari kegiatan/ program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.

Menurut Wibowo (2014:7)Kinerja berasal dari pengertian *performance* yang artinya hasil kerja atau prestasi kerja. Kinerja mempunyai makna yang lebih luas, bukan hanya kerja, tetapi termasuk bagaimana proses pekerjaan berlangsung. Kinerja adalah tentang melakukan pekerjaan dan hasil yang dicapai dari pekerjaan tersebut. Kinerja adalah tentang apa yang dikerjakan dan bagaimana cara mengerjakannya.

Pengertian keuangan daerah sebagaimana dimuat dalam penjelasan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu yang berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Pengertian keuangan daerah sebagaimana dalam ketentuan umum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, adalah sebagai berikut:

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Berdasarkan beberapa pengertian kinerja keuangan pemerintah daerah di atas maka pada penelitian tersebut penulis menyatakan bahwa Kinerja Keuangan adalah segala bentuk kegiatan/ pogram yang melakukan pekerjaan dan hasil yang di capai dari pekerjaan tersebut khususnya di bidang penyelenggaraan pemerintah yang dapat dinilai dengan uang ataupun barang yang dapat dijadikan barang milik daerah dan sebagai upaya untuk mencapai kinerja keuangan pemerintah yang baik. Untuk itu perlu mengetahui perkembangan pencapaian standar, target, dan waktu yang tersedia. Pengukuran perlu dilakukan untuk mengetahui apakah pelaksanaan dapat berjalan sesuai rencana, apakah terdapat kesenjangan kinerja, dan apakah hasil akhir diperkirakan dapat dicapai. Apabila tidak dapat mengukur, maka pemerintah tidak dapat mengelola pelaksanaan kinerja yang dapat menjamin pencapaian tujuan dan sasaran yang telah direncanakan.

Pengukuran kinerja dapat dibagi menjadi dua yaitu kinerja keuangan dan kinerja non keuangan. Kinerja keuangan dapat diukur dengan melakukan analisis laporan keuangan pemerintah daerah. Salah satu yang dapat dilakukan untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah adalah dengan menggunakan analisis rasio keuangan berupa rasio kemandirian daerah, rasio ketergantungan daerah, desentralisasi fiskal, efisien dan efektivitas PAD, efesiensi dan efektivitas pajak daerah, derajat kontribusi BUMD, dan rasio kemampuan mengembalikan pinjaman (*Debt Service Coverage Ratio),* dan rasio utang terhadap belanja. Pengukuran kinerja non keuangan organisasi publik dapat dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja.

Rasio-rasio sebagai alat ukur kinerja keuangan pemerintah daerah menurut Mahmudi (2016:140) sebagai berikut:

1. Rasio kemandirian

Rasio kemandirian keuangan daerah hitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah dibagi dengan jumlah pendapatan bantuan/transfer dari pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman daerah yang diterimanya. Paendapatan asli daerah merupakan sumber penerimaan daerah asli yang digali di daerah meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Semakin besar nilai PAD terhadap total pendapatan yang dihasilkan dari rasio ini maka menunjukan pemerintah daerah semakin tinggi kemandirian keuangan daerahnya.

*Rasio Kemandirian =*  *x 100%*

Keterangan :

*i =* Kabupaten/ Kota

Dengan rasio kemandirian dan kemampuan keuangan daerah yang tampak dalam Tabel 2.1 berikut ini:

**Tabel 2.1**

**Kriteria Rasio Kemandirian**

|  |  |
| --- | --- |
| Rasio Kemandirian (%) | Kemapuan Pemerintah Daerah |
| 1. – 25 | Rendah Sekali |
| * 25 – 50 | Rendah |
| * 50 – 75 | Sedang |
| * 75 – 100 | Tinggi |

*Sumber : Mahmudi (2016:141)*

1. Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas PAD menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan yang dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan target penerimaan PAD (dianggarkan). Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

*Rasio Efektivitas =*  *x 100%*

1. Rasio Efisiensi

Dalam mengukur kinerja pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD, indikator rasio efektivitas PAD saja belum cukup, karena jika dilihat dari hasil rasio efektivitasnya yang sudah baik kemungkinan biaya untuk mencapai target tersebut sangatlah besar, maka pemungutan PAD tersebut tidak efisien. Oleh karena itu perlu pula dihitung rasio efisiensi PAD. Rasio ini dihitung dengan cara membandingkan biaya yang dikeluarkan pemerintah daerah untuk memperoleh PAD dena realisasi penerimaan PAD atau membandingkan antara output yang berupa realisasi belanja daerah dengan input yang berupa realisasi pendapatan daerah. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

*Rasio Efesiensi =*  *x 100%*

Keterangan :

*i =* Kabupaten/ Kota

Semakin kecil nilai rasio ini maka semakin efisien kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan PAD.

1. Analisa Pertumbuhan Pendapatan

Analisa pertumbuhan pendapatan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran, kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan pendapatan secara positif atau negatif. Tentunya diharapkan pertumbuhan pendapatan tersebut positif dan kecendrungannya (*trend)* meningkat. Sebaliknya jika terjadi pertumbuhan yang negatif maka hal itu menunjukkan terjadinya penurunan kinerja pendapatan dan harus dicari penyebab penurunannya, apakah karena faktor ekonomi makro yang diluar kendali pemerintah daerah atau karena manajemen keuangan daerah yang kurang baik. Jika peningkatan peningkatan pendapatan daerah lebih rendah dari tingkat inflasi, maka pemerintah daerah harus menggunakan jalan lain yaitu melakukan efisiensi belanja secara ketat, jika tidak maka kinerja keuangan daerah akan merosot. Selain mempertimbangkan faktor inflasi, penetapan target pertumbuhan pendapatan juga harus mempertimbangkan asumsi anggaran yang lain, misalnya kurs rupiah, harga minyak, dan sebagainya.

Berdasarkan beberapa rasio diatas yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah, maka dalam penelitian ini penulis hanya menggunakan rasio kemandirian keuangan daerah. Rasio kemandirian keuangan daerah dipilih dalam penelitian ini karena data yang terkait rasio dan penelitian tersebut sudah lengkap dan tingkat kemandirian di Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan terkhusus tahun 2016 terjadi fluktuasi.

**2.5 Jumlah Penduduk**

Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan menetap serta sudah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh peraturan negara. Penduduk adalah orang atau sekelompok orang yang tinggal di suatu tempat *(*[*www.bps.go.id*](http://www.bps.go.id)*)*.

Pengertian penduduk yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 26 ayat 2 menyatakan bahwa “Penduduk Indonesia adalah warga Negara Indonesia dan warga Negara Asing yang menetap di Indonesia”. Data kependudukan merupakan salah satu data yang sudah menjadi tugas dari Badan Pusat Statistik setiap daerah, provinsi, dan negara untuk mendata serta mempublikasikan hasil data tersebut untuk keperluan konsumen baik bagi negara dan masyarakat. Data kependudukan yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik berasal dari berbagai sumber seperti:

1. Sensus Penduduk (SP)

Sensus Penduduk dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali. Sensus penduduk telah dilaksanakan sebanyak enam kali sejak Indonesia merdeka, yaitu tahun 1961, 1971, 1980, 2000, dan 2010. Sensus penduduk menggunakan dua tahap, yaitu pencacahan lengkap dan pencacahan sampel. Informasi yang lebih lengkap dikumpulkan dalam pencacahan sampel dengan pendekatan *de jure*  dan  *de facto* yang diterapkan untuk mencakup semua orang dalam area pencacahan. Mereka yang mempunyai tempat tinggal tetap dilakukan dengan pendekatan *de jure,* dimana mereka dicatat sesuai dengan tempat tinggal mereka secara formal, sedangkan bagi mereka yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap maka akan dilakukan dengan pendekatan *de facto* dan dicatat dimana mereka berada.

1. Survey Penduduk Antar Sensus (SUPAS)

Survey penduduk antar sensus dilaksanakan di pertengan periode antara dua sensus penduduk. Rumah tangga yang terpilih di wawancarai untuk mendapatkan informasi mengenai kondisi kependudukan misalnya fertilitas, mortalitas, dan migrasi.

1. Survey Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS)
2. Registrasi Penduduk Pertengahan Tahun

Registrasi penduduk pertengahan tahun merupakan registrasi penduduk dan populasi yang diperoleh dari catatan administrasi perangkat desa. Pada tingkat regional dan nasional, kegiatan ini dilakukan oloeh Kementerian Dalam Negeri.

Patriati (2010:29) dalam penelitiannya menyatakan “Jumlah penduduk berhubungan erat dengan pendapatan khususnya pendapatan pajak bagi yang memiliki npwp atau tergolong menengah atas dan pendapatan retribusi yang diperuntukkan bagi kalangan menengah bawah dan tidak memiliki npwp demi terciptanya pemerataan yang baik, bertambahnya jumlah penduduk mengakibatkan objek pajak dan retribusi bertambah luas sehingga penerimaan daerah pun juga meningkat, dan kinerja pemerintah dalam memberikan pelayanan publik juga akan semakin baik”.

Darmanto (2012:32) dalam penelitiannya mengindikasikan bahwa kepadatan penduduk terkait dengan kinerja keuangan pemerintah daerah. ketika jumlah penduduk meningkat menyebabkan peningkatan permintaan efisiensi pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan sebaik-baiknya terhadap publik.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu maka dalam penelitian kali ini penulis sependapat dengan pernyataan Patriati (2010:29) yang menyatakan bahwa Jumlah penduduk merupakan keseluruhan jumlah penduduk pada kabupaten/kota di Sumatera Selatan. Selain itu, Jumlah penduduk juga berhubungan erat dengan pendapatan khususnya pendapatan pajak bagi yang memiliki npwp atau tergolong menengah atas dan pendapatan retribusi yang diperuntukkan bagi kalangan menengah bawah dan tidak memiliki npwp demi terciptanya pemerataan yang baik, bertambahnya jumlah penduduk mengakibatkan objek pajak dan retribusi bertambah luas sehingga penerimaan daerah pun juga meningkat, dan kinerja pemerintah dalam memberikan pelayanan publik juga akan semakin baik.

**2.6 Ukuran Pemerintah Daerah**

Ukuran pemerintah daerah menunjukan seberapa besar pemerintah daerah, yang salah satunya dapat diukur dari jumlah aset yang dimiliki daerah seperti yang tercantum dalam jurnal Aziz (Vol XI No 1, 2016;90) dan penelitian yang dilakukan oleh Agnemas (2017:18) yang menyebutkan bahwa tujuan utama dari program kinerja pemerintah daerah adalah memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Untuk memberikan pelayanan yang baik harus didukung oleh aset yang baik pula. Oleh karena itu, diperlukan sumber daya dan fasilitas yang memadai untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian, semakin besar ukuran pemerintah daerah yang ditandai dengan besarnya jumlah aset pemerintah daerah, maka diharapkan akan semakin tinggi kinerja pemerintah daerah tersebut.

Ukuran pemerintah daerah dilakukan untuk mengetahui besar kecilnya obyek dan kelengkapan sumber daya serta fasilitas dari pemerintah daerah tersebut dalam memberikan pelayanan publik, dan untuk mengetahui ukuran pemerintah daerah tersebut salah satunya adalah dengan mengetahui total aset pemerintah daerah tersebut. Kerangka Konseptual dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah mengungkapkan dalam paragraf 65 ayat (a):

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyedia jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Kerangka Konseptual dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 menyatakan dalam paragraf – paragrafnya bahwa:

1. Menurut pasal 66 menyebutkan bahwa manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah, berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah.
2. Menurut pasal 67 menyebutkan bahwa aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan non lancar. Suatu aset diklasifikasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai aset non lancar.
3. Menurut pasal 68 menyebutkan bahwa aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan.
4. Menurut pasal 69 menyebutkan bahwa aset non lancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang, dan aset tak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset non lancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.
5. Menurut pasal 71 menyebutkan bahwa aset tetap meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam pengerjaan.
6. Menurut pasal 72 menyebutkan bahwa aset non lancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya seperti aset tak berwujud dan aset kerja sama (kemitraan).

**2.7 Dana Perimbangan**

Dana Perimbanganadalah pendapatan yang diterima pemerintah daerah yang berasal darisumber eksternal dan tidak memerlukan adanya pembayaran kembali (Hendro, 2010:25). Dana perimbangan ini merupakan hasil kebijakan pemerintah pusat dibidang desentralisasi fiskal demi keseimbangan fiskal antara pusat dan daerah. Dana perimbangan selain dimaksudkan untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangannya, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara pusat dan daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintah antar daerah.

Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Dana perimbangan adalah dana yaang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan terdiri dari

1. Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana Bagi Hasil dijelaskan sebagai dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka presentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dalam penjelasannya Dana Bagi Hasil pada APBN merupakan pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber daya nsional yang berada di daerah berupa pajak dan sumber daya alam.

1. Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum merupakan dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

1. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus, selanjutnya disebut DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

DAK diprioritaskan untuk membantu daerah-daerah dengan kemampuan keuangan di bawah rata-rata nasional, dalam rangka mendanai kegiatan penyediaan sarana dan prasarana fisik pelayanan dasar masyarakat yang telah merupakan urusan daerah.

Pemberian dana perimbangan ini akan dipantau penggunaanya oleh pemerintah pusat. Oleh karena itu, semakin besar dana perimbangan maka pengawasan dari pemerintah pusat semakin ketat sehingga diharapkan akan membuat pemerintah daerah akan semakin berhati-hati dalam pelaksanaan program kerjanya. Hal ini akan mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan kinerjanya sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangannya karena sumber keuangannya berasal dari pihak eksternal.

Proksi daridana perimbangandalam penelitian ini menggunakan proksi yang sama dalam jurnal penelitian Aziz (Vol XI No 1, 2016). Pengukuran ini dipilih karena dana perimbangan merupakan bagian dari pendapatan daerah yang berasal dari lingkungan eksternal (luar kotamadya) dan besarnya ketergantungan pemerintah daerah dari transfer pemerintah pusat (80% - 98%).

*Dana Perimbangan =*

**2.8 Penelitian Terdahulu**

Penelitian sebelumnya yang berkaitan tentang Jumlah Penduduk, UkuranPemerintah Daerah*,* dan Dana Perimbanganterhadap Kemandirian Kinerja Keuangan dapat dilihat pada tabel 2.2.

**Tabel 2.2**

**Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Peneliti/Tahun** | **Judul** | **Variabel (Dimensi)** | **Hasil Penelitian** | **Persamaan** | **Perbedaan** |
| 1 | Aziz (2016) | Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota Di Jawa Timur) | 1. Ukuran Pemerintah Daerah 2. Dana Perimbangan 3. Belanja Daerah | 1.Ukuran pemerintah daearh, Dana Perimbangan*,* dan Belanja Daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan. | 1. Meniliti dengan menggunakan dua variabel independen yang sama yaituUkuran Pemda*,* danDana Perimbangan.  2. Meneliti dengan menggunakan variabel dependent yang sama yaitu Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. | 1. Variabel independent yang berbeda dari peneliti terdahulu yaitu Jumlah Penduduk*.*  2. Objek penelitian terdahulu yaitu pemerintah daerah kabupaten/kota di Jawa Timur, sedangkan peneliti kabupaten/kota di Sumatera Selatan.   1. Peneliti terdahulu mengukur kinerja keuangan dengan menggunakan rasio efisiensi sedangkan peneliti menggunakan rasio kemandirian. |
| 2 | Ayuningsih  (2016) | Pengaruh *Size, Wealth, Leverage, Belanja Daerah* dan *Intergovernmental Revenue* terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Jawa Tengah | 1. ukuran pemerintah daerah 2. *Wealth* 3. Rasio Utang *(Leverage)* 4. *Belanja Daerah* 5. Dana   Perimbangan | 1. ukuran pemerintah daerah*, Leverage, dan* dana perimbangan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. 2. Sedangkan *Wealth* dan *Belanja Daerah* berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah | 1. Peneliti menggunakan dua variabel independent yang sama yaitu ukuran pemerintah daerah*,* dan dana perimbangan*.*   *.*   1. Meneliti dengan menggunakan variabel dependent yang sama yaitu Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. | Variabel independent yang berbeda dari peneliti terdahulu yaitu jumlah penduduk*.*  2. Objek penelitian terdahulu yaitu pemerintah daerah kabupaten/kota di Jawa Timur, sedangkan peneliti kabupaten/kota di Sumatera Selatan. |
| 3 | Retnowati (2016) | Analisis Pengaruh Tingkat Kekayaan Daerah, Belanja Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah Leverage dan Intergovernmental Reveneu terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Daerah/Kota Se-Jawa Tengah 2011-2-13) | 1. Kinerja Keuangan Daerah 2. Kekayaan Daerah 3. Belanja Daerah 4. Ukuran Pemerintah Daerah 5. *Leverage* 6. Dana Perimbangan | 1. Variabel belanja daerah dan ukuran pemerintah daerah merupakan faktor yang berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, partisipasi penganggaran mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap rasa percaya diri. 2. Sedangkan tingkat kekayaan daerah, *leverage,* dan  *intergovernmental Reveneu* tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan poemerintah daerah. | 1. Meneliti dengan menggunakan dua variabel independent yang sama yaitu, Ukuran  Pemerintah Daerah, dan Dana Perimbangan 2. Meneliti dengan menggunakan variabel dependent yang sama yaitu Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah | 1. Variabel independent yang berbeda dari peneliti terdahulu yaitu jumlah penduduk*.*  2. Objek penelitian terdahulu yaitu pemerintah daerah kabupaten/kota se- Jawa Tengah, sedangkan peneliti kabupaten/kota di Sumatera Selatan.   1. Peneliti terdahulu mengukur kinerja keuangan dengan menggunakan rasio efisiensi sedangkan peneliti menggunakan rasio kemandirian. |
| 4 | Darmanto (2012) | Pengaruh, *Population, Employment, Size* dan *Leverage* terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia | 1. *Population*  2. *Employment*  3. *Size*  4. *Leverage*  5. Kinerja Keuangan | 1 . Jumlah penduduk dan leverage berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di indonesia.  2. Variabel jumlah tenaga kerja (*employment)* dan ukuran pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia. | 1. Peneliti menggunakan variabel independent yang sama yaitu jumlah penduuk danukuran pemerintah daerah 2. Peneliti menggunakan variabel dependent yang sama yaitu Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah | 1. Variabel independent yang berbeda dari peneliti terdahulu yaitudana perimbangan. 2. Objek penelitian terdahulu yaitu pemerintah daerah di Indonesia, sedangkan peneliti kabupaten/kota di Sumatera Selatan. 3. Peneliti hanya mengukur kinerja keuangan dengan menggunakan rasio kemandirian. |
| 5 | Agnemas (2017) | Pengaruh, *Population, Employment, Size* dan *Leverage* terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan | *Population*  2. *Employment*  3. *Size*  4. *Leverage*  5. Kinerja Keuangan | 1. Seluruh variabel independent yaitu *population, employment, size,* dan *leverage* secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Sumatera Selatan | 1. Peneliti menggunakan variabel independent yang sama yaitu jumlah pendudukdan ukuran pemerintah daerah. 2. Peneliti menggunakan variabel dependent yang sama yaitu Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 3. Objek penelitian sama yaitu di pemerintah daerah kabupaten/kota di Sumatera Selatan 4. Pengukuran kinerja dengan rasio kemandirian. | 1. Variabel independent yang berbeda dari peneliti terdahulu yaitudana perimbangan. |

*Sumber : data yang diolah, 2018*

* 1. **Kerangka Pemikiran**

Kerangka pemikiran merupakan sintesa tentang hubungan antar variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan. Berdasarkan teori-teori yang telah dideskripsikan tersebut, selanjutnya dianalisis secara kritis dan sistematis, sehingga menghasilkan sintesa tentang hubungan antar variabel yang diteliti. Sintesa tentang hubungan variabel tersebut selanjutnya digunakan untuk merumuskan hipotesis (Sugiyono 2013: 60-61).

Berdasarkan tujuan dari penelitian ini untuk menguji ada atau tidaknya pengaruh jumlah penduduk*,* ukuran pemerintah daerah*,* dandana perimbanganterhadap kemandirian kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Sumatera Selatan yang dinyatakan dengan rasio kemandirian maka penulis mencoba menguraikannya dalam bentuk kerangka pemikiran sebagaimana yang disajikan pada gambar 2.1

Jumlah Penduduk

( X1 )

**H1**

Ukuran Pemerintah Daerah

( X2 )

Kemandirian Kinerja Keuangan (Y)

**H2**

**H3**

Dana Perimbangan

( X3 )

**H4**

*Sumber : data yang diolah, 2018*

Keterangan :

H1- H3 = Uji Parsial

H4 = Uji Simultan

**Gambar 2.1**

**Kerangka Pemikiran**

Berdasarkan gambar kerangka pemikiran di atas, maka peranan kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah untuk menggambarkan secara tepat objek yang akan diteliti dengan cara memberikan suatu gambaran yang jelas dan sistematis. Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis pengaruh variabel independen yaitu jumlah penduduk *(X1),* ukuran pemerintah daerah *(X2),* dandana perimbangan *(X3),* terhadap variabel dependent yaitu kemandirian kinerja keuangan pemerintah daerah (Y) baik secara simultan maupun parsial.

* 1. **Hipotesis**

Hipotesis merupakan jawaban sementara yang hendak diuji kebenarannya dengan melihat hasil analisis peneliti. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

H1 : Terdapat pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Kemandirian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan.

H2 : Terdapat pengaruh UkuranPemerintah Daerahterhadap Kemandirian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan.

H3 : Terdapat pengaruh Dana Perimbanganterhadap Kemandirian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan.

H4 : Terdapat pengaruh Jumlah Penduduk*,* UkuranPemerintah Daerah*,* danDana Perimbanganterhadap Kemandirian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan.